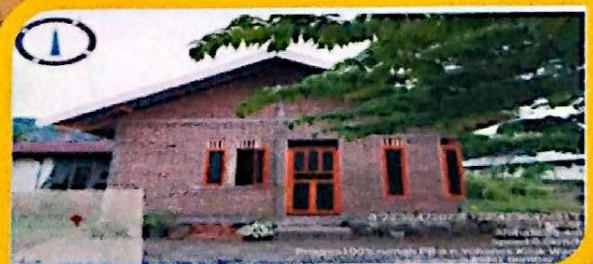




RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



KABUPATEN FLORES TIMUR 2024
dinasperumahanflotim@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, renja perangkat daerah disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Kabupaten Flores Timur.

Rencana Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2025 ini merupakan dokumen rencana pembangunan satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, yang disusun secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan yang dicapai dalam musrenbang tahunan (musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum OPD dan musrenbang Kabupaten) dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 serta menilai tingkat pencapaian kinerja.

Larantuka, 10 Juli 2024

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	15
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
Bab III Tujuan dan Sasaran Prangkat Daerah	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	31
3.3 Program dan Kegiatan	32
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan	35
Bab V Penutup.....	43

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.....	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur.....	13
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	16
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Flores Timur....	23
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025.....	31
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	33
Tabel 4.1. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.....	36



SALINAN

**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 219 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024**

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya beberapa asumsi yang mendasari perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah mengalami pergeseran akibat adanya perubahan lingkungan internal dan eksternal maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menghasilkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang baik dan bermutu, perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, rencana kerja program,

kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mengarahkan pelaksanaannya dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

b. Ketua Pelaksana

- a. mengoordinasikan penyusunan dan perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- b. bertanggung jawab terhadap perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan Perangkat Daerah, serta bertanggung jawab terhadap teknis penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah PD;
- c. mengoordinasikan penyusunan, perumusan akhir materi dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- d. mengoordinasikan penyusunan perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Renja PD pada aplikasi SIPD Bidang Informasi Pembangunan Daerah.

c. Sekretaris

- a. membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan dan perumusan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, target indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam mengoordinir penyusunan dan merampungkan materi akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. membantu Ketua Pelaksana dalam menyelesaikan administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. membantu Ketua Pelaksana dalam penyusunan perubahan rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Renja PD pada aplikasi SIPD Bidang Informasi Pembangunan Daerah.

d. Anggota

Membantu Ketua Pelaksana dalam urusan penyusunan dan perampungan materi Perubahan Renja PD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 berdasarkan arahan dan pembagian tugas dari Ketua Pelaksana.

- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan penetapan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 9 Juli 2024

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 219 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 JULI 2024

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024**

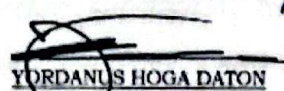
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Perangkat Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Perangkat Daerah	Ketua Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi atau Pejabat Fungsional Perencana Perangkat Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang/Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/Pejabat Fungsional/ Staf Perangkat Daerah	Anggota

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttu

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 merupakan penjabaran Tahun Ketiga Renstra PD Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Renja PD Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2025 disusun berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD

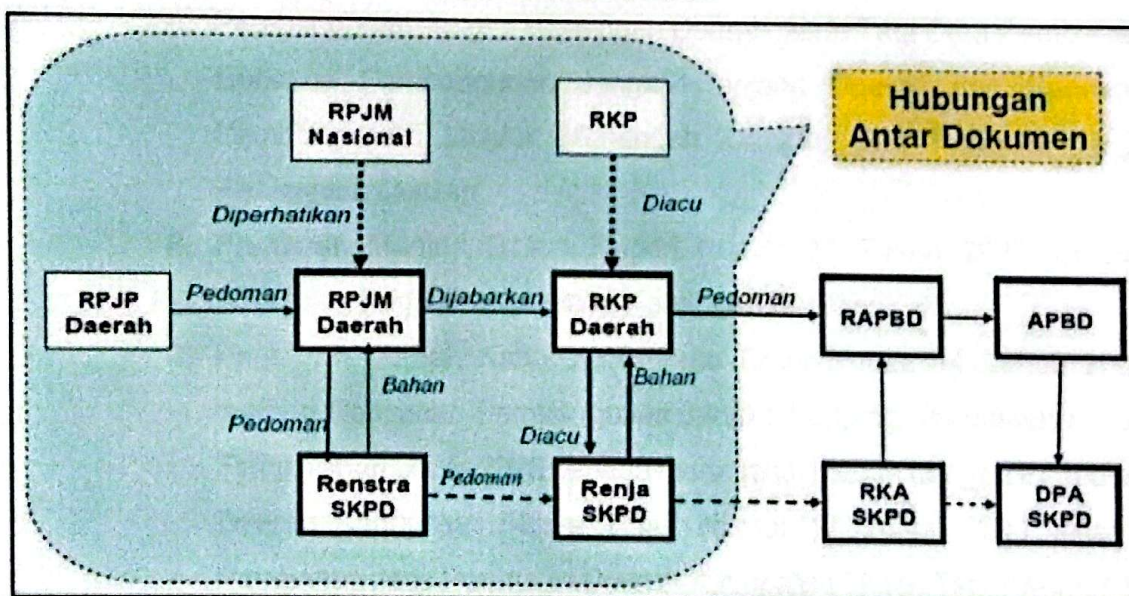
berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati.

Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Selanjutnya Renja PD Tahun 2025 menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen
Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur;
13. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 yang merupakan penjabaran RENSTRA Tahun Ketiga Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan kawasan permukiman dan urusan pertanahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025 serta Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Renja Tahun 2025 maka perlu dilakukanya evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan realisasi Renja 2024, Sebagaimana terlihat pada table 2.1 berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Program/ Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD s/d Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra PD s/d 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=8+7+9	11=10/4
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1-4	2-10	0-2	01		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									
1	04				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
						Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)								
						Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai (%)								
						PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (org)								
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)								
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)	420	142						
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kerja dan keuangan(Dokumen)	420	142						
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN(kali)	142	116						
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (kali)	70	56						
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi Pembayaran Gaji dan Tunjangan (bulan)	72	60						
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	11.285	38.893						
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan penerangan kantor (Komponen)	18	19						
			01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan Gedung kantor	12	7					
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang disediakan (Jenis)	302	121						
						Jumlah ATK yang disediakan (jenis)	174	115						
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan (Buku, lembar)	2100	32261						

x	xx	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan(Jenis)	2400	962						
x	xx	01	2,06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman (Dos)	5400	4770						
x	xx	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi (Kali)	879	638						
x	xx	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	4.450	3.166						
x	xx	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat (Kali)	4350	3050						
x	xx	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	72	60						
x	xx	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga teknis Perkantoran yang disediakan (Orang)	28	56						
x	xx	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)	23	27						
x	xx	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan yang dilayani Perizinan (unit)	20	20						
						Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara (unit)								
x	xx	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Gedung)	1	2						
x	xx	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	4						
		01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)	1	1						
1	04	03				Persentase Rumah layak huni (%)	100							
						Persentase backlog (%)	5,56							
1	04	03	2,02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		-	-						
1	4	03	2,02	01	Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah buku Data base(buku)	-	-						
1	4	03	2,03		Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah layak huni (%)	1.500	762						
1	4	03	2,02	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi (Rumah)	1.500	762						
						Jumlah rumah yang dibangun (rumah)	-	-						
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU %								
1	04	05	2,01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU	91	16						
1	04	05	2,01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Jalan dan Jembatan Lingkungan (Lokasi/Ruas)	91	16						
2	10				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
2	10	04			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Prosentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)								
2	10	04	2,01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumenPenyelesaian Sengketa Tanah Garapan (dok)	45	33						
2	10	04	2,01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanian dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah konflik pertanian yang difasilitasi (kasus)	45	33						
						Jumlah lokasi yang dilakukan penyuluhan (Kali)								

2	10	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah pemda yang difasilitasi (%)													
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah (Dokumen)	85	43											
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tanah pemda yang difasilitasi(Ha)	85	43											
2	10	06			Program Redistribusi Tanah, Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Luas lahan yang bersertifikat (%)													
2	10	06	2.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah (dok)	275	29											
					Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/ kota (Ha)	Jumlah Lokasi yang dilakukan sosialisasi (Kecamatan)	19	-											
2	10	06	2.01	02		Jumlah bidang tanah yang difasilitasi (Lokasi)	256	29											

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai dengan Tahun 2022	Target dan realisasi kinerja kegiatan SKPD tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra PD s/d 2024	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100							
						Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100							
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100							
						Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan	100							
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah (Doc)								
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah (Doc)	8		2	2	100	2	4	50
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	8		2	2	100	2	4	50

1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD (Dok)	12		3	3	100	3	4	90
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	17		2	5	100	5	10	39
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)								
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	25/14		25/14	25/14	100	25/1	50/25	100
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (laporan)	36							
1	04	01	2.02	0003	Penatausahaan Penatausahaan dan Pengukuran/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Tersusun (laporan)	0		1	2	200	1	2	100/100
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	8		2	2	100	2	2	25
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)								
1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1							
1	04	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	20		2	2	100	2	2	10
1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (laporan)	18							
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)								
1	04	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	36							
1	04	01	2.05	0005	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48		1	1	100	1	1	2
1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	9							
1	04	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	1							
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)								
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)	3							
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	8		2	2	100	2	2	25
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4		1	2	200	1	1	25
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8		2	2	100	2	2	25
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)	8		2	2	100	2	2	25
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan Yang Disediakan (Dokumen)	4		1	1	100	1	1	25
1	04	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	48		12	12	100	12	12	25
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48		12	12	100	12	12	25
1	04	01	2.06	00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	4							

1	04	01	2.06	0001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinamis pada SKPD (Dokumen)	36									
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)										
1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Yang Disediakan (Unit)	2									
1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6									
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	3									
1	04	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Website Kantor yang Disediakan	3									
1	04	01	2.07	0001	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan (unit)	7									
1	04	01	2.07	0001	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan (unit)	3									
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)										
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat (laporan)	48	12	12	100	12	12	25			
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (laporan)	48	12	12	100	12	12	25			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran yang di Sediakan (laporan)	48	12	12	100	12	14	29			
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)										
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	4	4	100	4	4	25			
1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara (unit)	28									
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	4									
1	04	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1									
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Peliha (unit)	1	1	1	100	1	1	100			
1	04	01	2.09	0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Peliha/Rehabilitas (unit)	23	2	2	100	2	2	9			
1	04	01	2.09	0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Peliha/Rehabilitas (unit)	15	6	6	100	6	6	40			
1	04	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	04	03			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni (%)										
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh dengan Luas Dibawah 10 Ha (Doc)										
1	04	03	2.02	08	Penyusunan Review Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun Terwew terlegalisasi (Doc)	2	2	2	100	2	2	100			
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha											
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1406	620	145	23,3 9	620	145	10			
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU %										
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU										
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, sarana dan Utilitas	8	2	2	100	2	2	25			

		Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018										
2	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018										Tidak di Anggarkan
3	Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		IKK	2	2	2	2	1		2	2	
4	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Difasilitasi (Rumah)		IKK	364	145	415	482	11		415	482	
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												
5	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		IKK	3	3	3	3	3		3	3	
6	penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		IKK	10	10	10	10	4		10	10	
7	Jumlah Bidang Tanah yang di Fasilitas		IKK	4	4	4	4	0		4	4	

Berdasarkan tingkat capaian pelayanan kinerja Dinas Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan terdapat 7 (Tujuh) indikator kinerja pelayanan yang terdiri dari 5 (Lima) IKK/IKU dan 2 (dua) pelayanan indikator SPM. Pada tingkat capaian indikator kinerja SPM hanya di jalankan pada saat terjadi bencana untuk korban yang terkena relokasi. Pada indikator IKU/IKK yang mendukung kinerja pelayanan perangkat daerah tingkat realisasi tidak bisa di ukur sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan perangkat daerah karna Pembangunan hanya dilakukan pada rumah tidak layak huni. Luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang menjadi wewenang kabupaten dengan luas penanganan di bawah 10Ha sehingga tingkat capaian realisasi pada indikator Persentase pemukiman yang tertata tidak dapat dijalankan karna luas penanganan permukiman kumuh diatas 10Ha merupakan kewenangan provinsi.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kebutuhan akan perumahan layak huni dan lingkungan permukiman yang berkualitas juga belum teratasi secara optimal. Pemenuhan kebutuhan hunian layak masih dihadapkan pada rendahnya tingkat keterjangkauan rumah layak bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah menetap pada rumah tidak layak huni dan sebagiannya tidak memiliki rumah (sharing rumah, kontrak atau sewa dll).

Minimnya ketersediaan sarana dan prasara dasar memberikan dampak pada lingkungan kumuh bahkan memungkinkan terciptanya lingkungan kumuh baru.

Permasalahan pembangunan pada bidang pertanahan pada bidang pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah sengketa status tanah dan minimnya kepemilikan tanah pemerintah daerah. Sengketa status tanah ini disebabkan oleh kurangnya kepastian hokum tanah dan juga minimnya ketersediaan tanah milik pemerintah daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah maka analisis kebutuhan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Flores Timur

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN										
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				7.497.260.200	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				7.460.193.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	2.451.350.300	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	2.741.693.000
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	
			Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100				Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian kompetensi (%)	100	
			Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)					Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		
Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	100	55.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)	15	53.000.000
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah (Doc)	2	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah (Doc)	2	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	10.000.000
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Larantuka (OPD)	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan	6	15.000.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian	Larantuka (OPD)	Jumlah Buku Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dan	6	15.000.000

Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	40.000.000	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	26	40.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Larantuka (OPD)	12	5.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Larantuka (OPD)	12	5.000.000
Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka (OPD)	12	5.000.000	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka (OPD)	12	5.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka (OPD)	1	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka (OPD)	2	30.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka (OPD)	1	15.000.000				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Larantuka	100	125.300.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Larantuka	35	150.300.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	1	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	1	5.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	2	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	2	10.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka (OPD)	1	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka (OPD)	1	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	2	15.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	2	15.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	2	8.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	2	8.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka (OPD)	1	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka (OPD)	1	1.800.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	12	15.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	12	15.000.000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	80.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD (Dokumen)	1	5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		63.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)		70.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Yang Disediakan	1	25.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Yang Disediakan	1	40.000.000
Pengadaan Mebel	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	10.000.000	Pengadaan Mebel	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	15.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	10.000.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Larantuka (OPD)	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	5.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Larantuka (OPD)	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1	5.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	10.000.000					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	8.000.000					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		64.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		67.600.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	22.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12	25.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	41.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12	41.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		60.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Larantuka	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)		100.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	35.000.000
Pemeliharaan Mebel	Larantuka (OPD)	Jumlah Mebel Yang Dipelihara (unit)	7	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Larantuka (OPD)	Jumlah Mebel Yang Dipelihara (unit)	7	5.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2	5.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	2	5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara (unit)	1	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara (unit)	1	25.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas (unit)	7	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas (unit)	7	15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas (unit)	3	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Rehabilitas (unit)	3	15.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				4.977.409.900	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				4.650.000.000
Program Kawasan Permukiman			91,99	4.525.000.000	Program Kawasan Permukiman		Cakupan rumah layak huni (%)	91,99	4.250.000.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			415	4.525.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)	207	4.250.000.000
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tersebar di 19 Kecamatan		415	4.525.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki (unit rumah)	207	4.250.000.000

3	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU (%)	100	452.409.900		
4	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian (Lokasi)	2	452.409.900
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Tersebar di 19 Kecamatan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100	68.500.000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (dok)	3	18.500.000	
5	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	18.500.000	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Tersebar di 19 Kecamatan	Persentase pengadaan tanah penda yang difasilitasi (%)	100	30.000.000	
	Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah dokumen Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan Santunan Tanah (dok)	10	30.000.000	
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten (Dokumen)	10	30.000.000	
	Program Retribusi Tanah, Kerugian Program Tahap Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Luas lahan yang bersertifikat (%)	100	20.000.000		

Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah dokumen Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah (dok)	4	20.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah (dokumen)	4	20.000.000

Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 19 Kecamatan	Jumlah dokumen Subjek dan Objek Retribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah (dok)	4	20.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Retribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah dokumen sidang panitia pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah (dokumen)	4	20.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrenbang Kecamatan dari awal bulan Maret sampai dengan awal bulan April tahun 2023 dengan lingkup 19 (Sembilan Belas) kecamatan dan telah dilakukan Forum OPD dan dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024.

Rekapitulasi musrenbang Kecamatan Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

DAFTAR USULAN MUSREMBANG KECAMATAN TAHUN 2024 HASIL VERIFIKASI PD

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

USULAN MUSREMBANG KECAMATAN TAHUN 2025						
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	LOKASI	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lebanuba	
2			Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Harubala	
3			Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Neleblolong	
4			Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Sukutokan	

5			
6		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
7		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
8		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
9		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
10		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
11		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
12		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
13		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
14		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
15		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
16		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
17		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
18		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
19		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
20		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
21		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
22		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
23		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
24		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
25		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
26		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
27		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
28		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
29		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
		Duanur	
		Lamawolo	
		Lewopao	
		Lelen Bala	
		Nobo	
		Tuagoetobi	
		Weranggere	
		Boleng	
		Lewat	
		Keluwain	
		Muda	
		Waitukan	
		Hoko Horowura	
		Bidara	
		Kolilanang	
		Bungalawan	
		Dokeng	
		Riangduli	
		Nubalema Dua	
		Bayuntaa	
		Nelelamadike	
		Waiwadan	
		Nelereren	
		Dawataa	
		Lite	

30				
31		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Watoone
32		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Riangpadu
33		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Gelong
34		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Nisa Nulan
35		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Tonuwotan
36		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lamaleka
37		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Hurung
38		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Bukit Seburii II
39		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Sandosi
40		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lamahoda
41		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Nimun Danibao
42		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Balaweling Noten
43		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Nelelamawangi Dua
44		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Pajinian
45		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Wolokibang
46		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Hinga
47		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Rodentena
48		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Ile Pati
49		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Watobaya
50		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Oesayang
51		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Sarotari
52		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Mokantarak
53		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lewobelen
54		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Ile Padung
		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Pantai Besar

55				
56		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Tiwatobi
57		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Ile Padung
58		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Larantuka
59		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lewobelen
60		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Baobage
61		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Sarotari
62		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Bungalima
63		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Waihali
64		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Ekasapta
65		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lokea
66		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Mudakaputu
67		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lewomuda
68		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Adonara
69		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Danibao
70		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Blepanawa
71		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Leraboleng
72		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Pohon Bao
73		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Duli Jaya
74		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Watowara
75		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Watotutu
76		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Ratulodong
77		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lewoloba
78		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Tobilota
79		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Nusa Nipa
		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Wotanulumado

80			
81		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
82		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
83		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
84		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
85		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
86		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
87		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
88		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
89		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
90		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
91		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
92		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
93		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
94		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
95		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
96		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
97		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
98		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
99		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
100		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
101		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
102		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
103		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
104		Pembangunan Rumah Layak Huni	5
		Bokang Wolomatang	
		Tana Tukan	
		Bliko	
		Pepakelu	
		Bukit Seburi I	
		Oringbele	
		Aransina	
		Bukit Seburi I	
		Riang Rita	
		Lewoawang	
		Klatanlo	
		Riangbura	
		Nusadani	
		Dulipali	
		Labelen	
		Hokeng Jaya	
		Lamawai	
		Lohayong I	
		Nileknoheng	
		Menanga	
		Waiula	
		Watanhura II	
		Birawan	
		Latonliwo	
		Lamawalang	

105		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Ritaebang	
106		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Labelen	
107		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Nurri	
108		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lewogeka	
109		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Bama	
110		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Nawokote	
111		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lewobunga	
112		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Wailebe	
113		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Oyangbarang	
114		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Kawuta	
115		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Wulublolong	
116		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lamapaha	
117		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Balaweling	
118		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Ongalereng	
119		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Ojandetun	
120		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Pukentobi Wangin Bao	
121		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Adolaba	
122		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Lohayong II	
123		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Latonliwo Dua	
124		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Waiwuring	
125		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Daniwato	
126		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Karawatung	
127		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Kobasoma	
128		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Demondei	
129		Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Ratulodong	

Pembangunan
Rumah Layak
Huni

5

Lewolere

USULAN POKOK PIKIRAN DPRD HASIL VERIFIKASI PD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	LOKASI	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Layak Huni	100	Desa Dawataa Kecamatan Adonara Timur	
2			Pembangunan Rumah Layak Huni	30	Desa Nobo Kecamatan Ile Boleng	
3			Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur	
4			Pembangunan Rumah Layak Huni	5	kecamatan witiham	
5			Pembangunan Rumah Layak Huni	5	kecamatan adonara	
6			Pembangunan Rumah Layak Huni	40	Kelurahan Weri, Sarotari, Pukentobi Wangibao, Lokea, Lohayong, Pohon Sirih, Pantai Besar dan Desa Mokantarak - Kec. Larantuka	
7			Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Desa Lewomuda, Kecamatan Demon Pagong	
8			Pembangunan Rumah Layak Huni	5	Desa Lewoawang, Kecamatan Ile Bura	
9			Pembangunan Rumah Layak Huni	40	Desa Halakodanuan, Mudakaputu, Tiwatobi - Kecamatan Ile Mandiri Desa Lewobunga, Desa Sinar Hadigala, Desa Lamatutu Kecamatan Tanjung Bunga	
10			Pembangunan Rumah Layak Huni	10	Desa Lewogeka Kecamatan Solor Timur	
11			Pembangunan Rumah Layak Huni	479	Desa Redontena, Adobala, Tuwagoetobi,	

12				Lewopulo, Mangaaleng, Pepakgeka, Sukutokan, Lambunga, Hinga, Lamapaha, Horinara dan Desa Muda, Kec. Kelubagolit	
			Pembangunan Rumah Layak Huni	20 Desa Lewotanahole, Desa Lamaole, Desa Lamawohong, Desa Titehena (Kecamatan Solor Barat)	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas dan kebijakan pembangunan nasional termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sebagai RKP tahun pertama peletak dasar transformasi dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, maka Pemerintah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 tersebut maka pembangunan nasional diarahkan pada 8 Prioritas Nasional.

Kebijakan Nasional tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Flores Timur (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan) untuk meningkatkan daya saing infrastruktur dan penuntasan kemiskinan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan jangka Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan daerah berdasarkan Renstra Perangkat daerah tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Capaian Tahun	Target Kinerja Sasaran
			2021	2023	2025
Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas rumah layak huni dan lingkungan hidup	Tingkat Kemiskinan	10,19	10,00	41,40

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel berikut;

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
3. Infrastruktur yang Handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3.3 Meningkatkan kualitas rumah layak huni dan lingkungan hidup	Persentase rumah layak huni %	41,40
		Persentase area kawasan kumuh %	15,23

3.3 Program dan Kegiatan

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Program dan Kegiatan yang akan direncanakan pada Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan pada Tahun 2025 mempunyai 2 (dua) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran. Program prioritas tersebut terdiri dari:

1. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan :

- 1) Penyusunan Review Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
- 2) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan :

- 1) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Rumusan rencana program prioritas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

KODE					RENCANA TAHUN 2024				PERKIRAAN MAJU WISUDA TAHUN 2025				
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)
1.04.2.10.0.0.02.0000					DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN								18.325.409.966
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				3.200.000.000				18.325.409.966
1	04		03	2.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan Rumah Tidak Layak Huni (%)		92,24	2.000.000.000			92,97	17.525.000.000
1	04		03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepulu) Ha				2.000.000.000				17.525.000.000
1	04		03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Kec.Larantuka : (Kel. Lokea, Kel Ekasapta, Kel. Amagara Pati)	105	2.000.000.000	DAU	Kinerja Menyesuai kan dengan Anggaran	415	17.525.000.000
							Kec.Ile Mandiri : (Desa Wailolong)						
							Kec. Solor Selatan : (Desa Lemanu, Desa Kenere)						
							Kec.Adonara Tengah : (Desa Kokotobo,Desa Lite, Desa Kenotan)						
							Kec. Adonara(Desa Tikatukan, Desa Adonara)						
							Kec. Ile Bura(Desa Nobo,Desa Lewoawang)						
							Kec. Lewolema(Desa Balukherin, Desa Bantala)						
							Kec. Demon Pagong (Desa Lamika,Desa Lewokluok)						
							Kec. Ile Boleng (Desa Dokeng)						
							Kec. Witihama(Desa Balbaga,Desa Tobitika)						
							Kec. Klubagolit(Desa Lamabunga,Desa Mengaleng)						
							Kec. Adonara Timur (Desa Lamalota, Desa Tuawolo,Desa Kiwangona)						

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2025.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Kabupaten Flores Timur Tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2025	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Prioritas	Pagu Indikatif (Rp)
1 04	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERUMUKAN DAN PERTANAHAN			7.460.193.000,00					7.460.193.000,00			10.239.132.000,00
1 04 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKAN		100						7.391.693.000,00			2.913.132.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100						2.741.693.000,00		x) Penunjang Prioritas	
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)	100									
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100									
		Persentase perencanaan dan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan (%)	100									
1 04 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								53.000.000,00			60.000.000,00
1 04 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)		20.000.000,00			22.000.000,00
1 04 01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		10.000.000,00			10.000.000,00
1 04 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan			Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		15.000.000,00			20.000.000,00
1 04 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		8.000.000,00			8.000.000,00
1 04 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.245.793.000,00			2.345.132.000,00
1 04 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.169.465.000,00			2.255.132.000,00

Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prakiraan Biaya	
						Target 2025	Pagu Indikator (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 04 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	61.328.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	70.000.000,00		
1 04 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00		
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.000.000,00				30.000.000,00		
1 04 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00		
1 04 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00		
1 04 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00		
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawalan			40.000.000,00				40.000.000,00		
1 04 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00		
1 04 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00		
1 04 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.000.000,00	Luar Daerah	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00		
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			150.300.000,00				177.000.000,00		
1 04 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00		
1 04 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Mula Rencana Tahun 2026	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 04 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1 04 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1 04 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1 04 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.500.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1 04 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	2.000.000,00
1 04 01 2 06 0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	20.000.000,00
1 04 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	80.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	75.000.000,00
1 04 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1 04 01 2 06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1 04 01 2 07 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70.000.000,00				95.000.000,00
1 04 01 2 07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	30.000.000,00
1 04 01 2 07 0003	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1 04 01 2 07 0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Flores Timur, Larantuka, Waihal	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1 04 01 2 07 0005	Pengadaan Aset Tak Berwujud							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025 (4)	Pagu Indikatif (Rp) (5)	Lokasi (6)	Sumber Dana (7)	Prioritas Daerah (8)	Pagu Indikatif (Rp) (9)
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1 04 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			67.600.000,00				66.500.000,00
1 04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	1.500.000,00
1 04 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	35.000.000,00
1 04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	41.400.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	RETRIBUSI JASA UMUM	x) Penunjang Prioritas	50.000.000,00
1 04 01 2.08 0005	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	35.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	23.000.000,00
1 04 01 2.08 0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	10.000.000,00
1 04 01 2.08 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	7.500.000,00
1 04 01 2.08 0008	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1 04 01 2.08 0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1 04 01 2.08 0010	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00
1 04 01 2.08 0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Flores Timur, Lantuka, Waihalai	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	x) Penunjang Prioritas	15.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			Prioritas Daerah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan rumah layak huni (%)	92,97	4.250.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			4.250.000.000,00			6.870.000.000,00
1 04 03 2.03 0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	207 unit rumah	4.250.000.000,00	Wulanggintang (Hokeng Jaya, Klatianlou, Neleknoheng, Waula, Nawokole, Ojan detum), Titehena (Watowara, Kobasoma, Bokangwoiomatang, Duli Jaya, Lerabolieng), Larantuka (Walbalun, Ekasapta, Sarotari, Lokea, Larantuka, Pante Besa, Pohon Sirih, Lewolere, Weri, Waihall, Pohon Bao, PTW, Mokantarak), Ile Mandiri (Watotutu, Mudakepetu, Tiwatobi, Lewoloba, Riangkemie), Tanjung Bunga (Latorliwo, Ratulodong, Nusanipa, Aransina, Latorliwo II), Solor Barat (Ritaebang, Tanah Lein, Nusakani, Karawatung, Daniwato, Ongalereng, Lamawalang), Solor Timur (Lohayong I, Wulubolong, Lamawai, Menanga, Walanthura II, Labelen, Lewogeka, Kawuta), Adonara Barat (Duanur, Walukan, Wawadan, Riangpadu, Tonuwafan, Wurung, Bukit Sabori II, Nimundanibao, Pajinian, Wokolibang, Ile Pati, Watobaya, Bugalina, Danibao, Bukit Sabori I), Wotan Ulumado (Bliko, Tanatukan, Wotan Ulumado, Toblota, Oyangbarang, Wailebe), Adonara Timur (Kwaelaga Lamawato, Lewobunga, Gelong, Dawandataa, Lelenbala).	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS	6.870.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prasarana Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Klubagolit (Lambunga, Sukutokan, Lamapaha, Keltuwain, Muda, Hinga, Redontiena, Pepakketu, Adobala), Wilihama (Watoone, Tuagoetobi, Waiwuring, Balaweling, Oringbele, Baobage, Balaweling Noteng, Sandosi, Lamaleka, Toblitika, Riangduli, Weranggere), Ile Boleng (Riangwale, Lebanuba, Nelebiolong, Harubala, Lamawolo, Nobo, Boleng, Bungalawan, Dokeng, Bayutaan, Nelelamadike, Neleleren, Nelelamawangi II), Demon Pagong (Bama, Lewonuda, Biepanawa)			
					Lewolema (Ile Padung, Lewobelen, Painapang), Ile Bura (Birawan, Riangrita, Lewoawang, Riangbura, Dulipali, Nuri), Adonara (Lamahoda, Adonara, Nisanulan, Kollianang), Adonara Tengah (Lewobele, Lewopao, Hokohorowura, Bidara, Nubalema II, Lite, Oyesayang), Salar Selatan (Kalike, Kenere)			
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan PSU (%)	2,4	400.000.000,00			3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	500.000.000,00
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			400.000.000,00				500.000.000,00
1 04 05 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian							
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	400.000.000,00	Kab. Flores Timur, Laranuka (Weri), Wilihama (Tuagoetobi), Adonara Timur (Lelenbala)	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	3. Infrastruktur yang handal dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	500.000.000,00
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			68.500.000,00				1.318.449.700,00
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENOKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Tanah (%)	100	18.500.000,00			x) Penunjang Prioritas	61.799.700,00

Kode	Unsur / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Kota			18.500.000,00				61.799.700,00
2 10 04 2.01 0000	Investigasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	18.500.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	61.799.700,00
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBAUNGAN	Persentase Pengadaan Tanah pemda yang difasilitasi (%)	66,67	30.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	1.200.000.000,00
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00				1.200.000.000,00
2 10 05 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	1.200.000.000,00
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH MINIMUM	Persentase Luas Lahan yang Bersertifikat (%)	100	20.000.000,00			x) Penunjang Prioritas	56.650.000,00
2 10 06 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Kekurangan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00				56.650.000,00
2 10 06 2.01 0000	Koordinasi Penyelesaian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota							
		Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENERIMAAN ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KEUANGAN DAERAH	x) Penunjang Prioritas	56.650.000,00

BAB V PENUTUP

Renja Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis periode 2023-2026 yang disusun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dokumen ini menjadi panduan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dalam dokumen Renja ini, Dinas berkomitmen untuk mendukung pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, pada tahun 2025, Dinas merencanakan 6 (Enam) program Kegiatan dan merumuskan 14 (Dua belas) kegiatan yang akan dilaksanakan, dilengkapi dengan indikator program dan indikator kegiatan beserta target dan rencana pendanaannya.

Dokumen Renja merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan yaitu rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025. Dalam rangka mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka setiap unit pada lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Pada saat kegiatan dilaksanakan maka setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab harus melaksanakan pengendalian secara periodik dilaksanakan melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Larantuka, 10 Juli 2024

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,


EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 00